

MENGETAHUI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN UNIT KERJA DI UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO

Ahmad Alfarid Polem¹⁾, Arlius¹⁾

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan dan Universitas
Bung Hatta Padang

Email: faridp2108@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai panduan dalam membangun komitmen terhadap pekerjaan unit kerja guna mencapai pemerintahan yang baik, yang bertujuan mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2024 di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode survei, yang melibatkan observasi dan pengumpulan data langsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Unit Kerja di UPT tersebut belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) karena SOP masih dalam tahap draf dan belum diimplementasikan.

Kata kunci : *prosedur operasional standar PPP*

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan adalah area yang meliputi daratan dan perairan di sekitarnya, yang memiliki batas-batas tertentu, dan berfungsi sebagai lokasi untuk aktivitas pemerintahan serta operasional sistem bisnis perikanan. sebagai lokasi di mana kapal perikanan berlabuh dan bersandar dan atau pemindahan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran serta sarana penunjang kegiatan perikanan.

Standard Operating Procedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan [1].

Pelabuhan Perikanan Pulau Tello terletak di Kelurahan Pasar Tello Provinsi Sumatera Utara. SOP memiliki peranan yang signifikan dalam kegiatan

perikanan tangkap, namun saat ini Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello belum optimal melakukan SOP. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui SOP sebagai acuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan satuan unit kerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi langsung di seksi Kesyahbandaran Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan pelayanan di Pelabuhan Perikanan Pulau Tello

Pengumpulan Data, data yang akan dikumpulkan melalui questioner. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang. Kepala Pelabuhan Perikanan, 5 karyawan Struktur

pengelolaan terdiri dari satu orang yang bertanggung jawab di Seksi Sarana Prasarana, satu orang di Seksi Operasional Pelabuhan, tiga orang di bagian Tata Usaha, dua karyawan honorer, serta seorang Kapten Nelayan.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan cara:

- Mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan aktivitas serta solusi yang diperlukan untuk mengatasinya.
- Membandingkan besaran biaya pelayanan dalam SOP dengan implementasinya di lapangan.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan antara kondisi di lapangan dan yang tercantum dalam SOP, mencari penyebab perbedaan tersebut, mengidentifikasi kendalanya, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Persepsi dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Indikator	Jawaban Responden (%)			
		SS	S	TS	STS
1.	Letak geografis Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Pulau Tello sangat strategis karena terletak di antara Pulau Marit, Lasondre dan Sibaranum. Berada dekat dengan Daerah penangkapan ikan, sehingga mutu ikan hasil tangkap dapat dipertahankan karena hari penangkapan Fishing trip menjadi lebih pendek.	2	4	0	0
2.	Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 42 ayat 2.	5	1	0	0
3.	Sebelum di terbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan Kapal.	5	1	0	0
4.	Setelah menerima pemberitahuan kedatangan kapal, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan segera mengatur tempat tambat atau labuh kapal perikanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan.	1	2	3	0
5.	Kapal perikanan yang telah melakukan tambat/labuh segera melapor dan membawa dokumen kapal serta Lookbook Perikanan ke Kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat kapal serta hasil tangkapan.	1	2	3	0
6.	Pegawai Syahbandar beralih bahwa kapal-kapal yang mengurus surat persetujuan berlayar di Syahbandar merupakan kapal langganan yang sudah dapat dipercaya keabsahan dokumen dan kelengkapan ainnya di atas kapal.	1	0	5	0
7.	Pemilik kapal tidak mau melapor hasil tangkapan kedalam SHTI Lembar awal, dengan alasan produk hasil tangkapan tidak untuk diekspor.	1	2	3	0
8.	Penerbitan STBLKK kedatangan dan keberangkatan nelayan hanya perlu menyediakan dokumen yang diperlukan, setelah dokumen diserahkan petugas akan melakukan cek list dokumen kapal dan cek fisik kapal, selanjutnya petugas akan mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal sesuai dengan SOP.	1	2	3	0
9.	Pendistribusian BBM di Syahbandar Pulau Tello yang lebih berperan adalah koperasi pelabuhan, namun Syahbandar berperan untuk memberi izin atas pendistribusian BBM sebelum melapor ke petugas koperasi.	1	1	4	0
Rata-Rata		2	1,667	2,3333	0

Hasil Penelitian “Bertujuan Untuk Mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan

Pantai Pulau Tello” Sehingga dapat dijelaskan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tello yaitu, presentase dari responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) adalah 2%, setuju (S) 1,667%, tidak setuju (TS) 2,333% dan sangat tidak setuju (STS) 0%.

Dari data yang didapat dari responden bahwa Satuan Unit Kerja di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), dikarena jangkauan lokasi yang agak sulit dicapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dengan mengikuti pedoman dalam Permen **KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014**, satuan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bekerja secara lebih terorganisir dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil yang didapatkan bahwa Satuan Unit Kerja di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), karena SOP masih dalam bentuk draf sehingga penerapannya belum dilakukan.

SARAN

Terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektifitas dan implementasi penelitian ini diantaranya penyusunan SOP yang detail dan praktis, Pelatihan dan Sosialisasi, Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkala, Penggunaan Teknologi Informasi, Penyediaan Mekanisme Pengaduan, Penguatan Budaya Kerja, Kolaborasi Antar Satuan Kerja, Pelibatan Stakeholder, Revisi dan Pembaruan Berkala, dan Diperlukan Penelitian Lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Tambunan, 2013 *Pedoman Penyusunan Standartd Operating Prosedur*, Edisi 2023, Penerbit Maiesta.